

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Secara sistem, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi dengan bentuk republik presidensial, dimana presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem ini diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Demokrasi di Indonesia mengalami evolusi yang sangat signifikan sejak kemerdekaan.

Pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang ada ditangan rakyat atau oleh rakyat (Djafar Massa, 2015). Secara mendasar yang dimana, sistem demokrasi merupakan bentuk dari pemerintah yang didalamnya terdapat semua warga negara memiliki hak yang setara untuk menentukan keputusan mereka dengan tujuan dapat mengubah kondisi kehidupan mereka. Sistem demokrasi memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara langsung maupun melalui perwakilan dalam menentukan sebuah perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Sebab itu didalam prinsip Negara Demokrasi partisipasi rakyat dan melibatkan rakyat sangatlah penting.

Sebagai negara yang demokrasi bentuk implementasi demokrasi dapat ditemui melalui adanya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang menjadi utama dalam kedaulatan rakyat dengan konteks negara demokrasi (Budiman Arif, 1996). Di negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus alat ukur dari

demokrasi. Pemilu merupakan sarana penting dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih yaitu hak untuk memilih ketua dan wakil dari berbagai calon yang ada. Menurut Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022, ditetapkan pemilu serentak dengan melakukan pemungutan suara pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota pada, Rabu 14 Februari Tahun 2024 (KPU).

Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat 27 berisi tentang adanya partai politik sebagai peserta pemilu. Pemilu juga menjadi momentum di setiap partai politik, yang dimana peserta pemilu dilakukan untuk memenangkan kontestasi tersebut, yang selalu diadakan sekali dalam lima tahun (Miriam Budiardjo, 2010). Partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara untuk memperjuangkan kepentingan politik, ideologi, dan cita-cita bersama. Dalam partai politik hak yang dimiliki oleh masyarakat harus di penuhi dan sejalan dengan amanat konstitusi, agar partai politik melaksanakan fungsi-fungsinya senantiasa mempertimbangkan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya dan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya (Sosiohumaniora, 2014). Partai politik melakukan berbagai cara dalam memenangkan kontestasi pemilu tersebut. Penggunaan strategi kampanye yang tepat serta pelembagaan partai yang berjalan baik tentu akan berdampak besar untuk mendongkrak perolehan suara partai politik.

Partai politik dalam peserta pemilu banyak mencari berbagai cara dalam

mendapatkan simpati masyarakat dan tentunya bisa mendapatkan suara sebanyak-banyaknya pada pemilu, dengan cara memperkuat basis suara yakni pemetaan kantong-kantong suara partai tersebut, selanjutnya yang tak kalah penting yaitu membangun eksistensi dan pola strategi kampanye yang sekiranya bisa dapat meningkatkan elektabilitas partai politik, serta mendapat simpati dari masyarakat luas (Yuwita Heni, 2018). Fungsi dan peranan partai politik mengalami dinamika atau pasang surut sesuai perkembangan sistem politik pada periode sistem politik demokrasi parlementer, partai politik menunjukkan fungsi dan peranan yang kuat. Partai politik dan parlemen (DPR) merupakan kerangka pokok mekanisme sistem politik. Stabilitas politik dan pemerintahan sangat tergantung pada “dukungan” partai-partai politik dalam parlemen. Sistem politik ini diterapkan dalam sistem multi partai. Betapa sulit membangun pola-pola kerja sama (koalisi) antar partai-partai politik dalam membentuk kabinet.

Pada saat ini partai politik memang dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang cukup kompleks seperti halnya pelembagaan partai politik yang kurang baik, karena partai politik tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat misalnya seperti, parlemen yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dimana partai harus mampu memperoleh suara minimal pada ambang batas parlemen yang ditetapkan oleh KPU agar dapat memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), tentu hal ini sangat memberatkan bagi suatu partai yang belum memiliki posisi yang kuat. Pelembagaan partai politik sangat menentukan dalam kemajuan dari partai itu sendiri (Mardaya Dkk, 2019).

Berbicara mengenai penurunan jumlah kursi pada pemilu 2024, di Indonesia

partai politik besar juga mengalami penurunan jumlah kursi di perlemen (Rochmanudin, 2024). Di tingkat Provinsi juga terjadi hal yang sama dimana mengalami penurunan jumlah kursi pada pemilu 2024 yaitu perolehan kursi partai Demokrat di DPRD Provinsi Jambi menurun dari 7 menjadi 5 kursi di pemilu 2024 (Anil Hakim, 2024). Faktor penyebab penurunan jumlah kursi yang terjadi memungkinkan terjadinya dua faktor yaitu internal dan eksternal.

Di Kabupaten Merangin Partai Golongan Karya (Golkar) juga mengalami penurunan jumlah kursi. Pada tahun 2019 perolehan jumlah kursi yang diraih partai Golkar di Kabupaten Merangin pada pemilihan legislatif tahun 2019 berhasil memperoleh 6 kursi dan tersebar pada IV Dapil di Kabupaten Merangin dan Herman Efendi terpilih menjadi Ketua DPRD di Kabupaten Merangin. Melihat trend positif di tahun 2019 bahwasanya partai Golkar akan menargetkan meraih kemenangan kembali pada pemilihan legislatif di tahun 2024. Partai Golkar memasang target memperoleh jumlah kursi terbanyak dengan mendapatkan delapan sampai sembilan kursi dan mendudukkan kadernya di tiap-tiap Daerah Pemilihan (Dapil) pada pemilihan legislatif di Kabupaten Merangin tahun 2024. Sesuai dengan mekanisme partai Golkar sudah dengan resmi mendaftarkan kadernya di KPU dan di terima langsung oleh komisioner KPU Kabupaten Merangin (Solehan, 2023).

Namun trend positif yang dicapai oleh partai Golkar pada pemilu 2019 berbanding terbalik dengan hasil pemilu 2024, yang dimana partai Golkar mengalami penurunan perolehan jumlah kursi DPRD Kabupaten Merangin. Partai Golkar tidak

mampu mempertahankan jumlah kursinya. Partai Golkar yang sebelumnya memperoleh enam kursi dengan memperoleh suara 37.844, pada pemilihan legislatif tahun 2019, dan pada pemilihan legislatif di tahun 2024 partai Golkar mengalami penurunan yang sangat signifikan dengan hanya memperoleh empat kursi dan hanya memperoleh suara sebanyak 27.815 di Kabupaten Merangin. Berikut data perolehan jumlah kursi dan suara partai Golkar tahun 2019 dan 2024.

**Tabel 1.1**  
**Perolehan Jumlah Kursi dan Suara pada Pemilu Legislatif**  
**Kabupaten Merangin Tahun 2019**

No.	Nama Partai	Jumlah Kursi	Suara
1.	Golkar	6 Kursi	37.844
2.	Kebangkitan Bangsa	2 Kursi	15.739
3.	Gerindra	3 Kursi	16.653
4.	PDI-P	4 Kursi	16.932
5.	Nasdem	3 Kursi	14.283
6.	Berkarya	1 Kursi	8.431
7.	Keadilan Sejahtera	3 Kursi	15.207
8.	Perindo	3 Kursi	15.895
9.	PPP	2 Kursi	12.642
10.	PAN	3 Kursi	17.067
11.	Hanura	2 Kursi	18.274
12.	Demokrat	3 Kursi	12.326

*Sumber Data: KPU Kabupaten Merangin (2019).*

**Tabel 1.2**  
**Perolehan Jumlah Kursi dan Suara pada Pemilu Legislatif**  
**Kabupaten Merangin Tahun 2024**

No.	Nama Partai	Jumlah Kursi	Suara
1.	Golkar	4 Kursi	27.815
2.	PKB	3 Kursi	17.361
3.	Gerindra	4 Kursi	23.724
4.	PDI-P	2 Kursi	17.268

5.	Nasdem	4 Kursi	21.159
6.	Hanura	1 Kursi	4.598
7.	PAN	5 Kursi	27.059
8.	Demokrat	3 Kursi	20.504
9.	Perindo	3 Kursi	13.943
10.	PPP	3 Kursi	23.994
11.	PKN	1 Kursi	9.285
12.	PKS	2 Kursi	14.891

*Sumber Data: KPU Kabupaten Merangin (2024).*

Adanya fenomena tersebut tentu dilatar belakangi dengan berbagai faktor baik internal maupun eksternal dari Partai Golkar. Penurunan jumlah kursi yang cukup signifikan dialami partai Golkar di Kabupaten Merangin berdasarkan hasil keputusan rekapitulas yang dilakukan KPU Kabupaten Merangin yang menyatakan bahwa partai Golkar hanya mendapatkan 4 kursi di pemilu legislatif tahun 2024 dari sebelumnya pada pemilu legislatif tahun 2019 partai Golkar mendapatkan jumlah kursi terbanyak dengan memperoleh 6 kursi dan menduduki sebagai Ketua DPRD Kabupaten Merangin. Berikut ini daftar nama-nama yang terpilih sebagai anggota legislatif dan jumlah perolehan suaranya di Kabupaten Merangin tahun 2019 dan 2024.

**Tabel 1.3**  
**Nama-Nama yang Terpilih sebagai Anggota Legislatif dan Jumlah Perolehan Suaranya di Kabupaten Merangin Tahun 2019**

No.	Nama	Dapil	Suara
1.	Herman Efendi, S.T., M.M.	Dapil 2	4.445
2.	Mulyadi, S.T., M.M.	Dapil 1	3.507
3.	Samdianto, S.Sos.	Dapil 2	2.667
4.	Sukar	Dapil 3	8.385
5.	Hasan Jalil	Dapil 1	2.104
6.	Suardi	Dapil 4	5.599

*Sumber Data: KPU Kabupaten Merangin (2019).*

**Tabel 1.4**  
**Nama-Nama yang Terpilih sebagai Anggota Legislatif dan Jumlah Perolehan Suaranya di Kabupaten Merangin Tahun 2024**

No.	Nama	Dapil	Suara
1.	Herman Efendi, S.T., M.M.	Dapil 2	6.159
2.	Sukar	Dapil 3	3.480
3.	Mulyadi, S.T., M.M.	Dapil 1	3.474
4.	Samdianto, S.Sos.	Dapil 2	3.498

*Sumber Data: KPU Kabupaten Merangin (2024).*

Oleh karena itu, menarik membahas lebih dalam mengenai konsolidasi pelembagaan partai Golkar dalam menghadapi pemilu legislatif tahun 2024. Konsolidasi pelembagaan partai politik menurut Randall dan Svasand (2002), merujuk pada proses pematapan partai politik, baik secara struktural maupun kultural.

Penelitian ini menggunakan 10 artikel jurnal nasional dan 1 artikel karya ilmiah internasional sebagai literatur review atau studi terdahulu. *Pertama* terdapat 3 artikel jurnal yang membahas mengenai penurunan jumlah kursi yang drastis pada partai politik, yaitu penelitian yang di lakukan Fadhlani Satria Wiranda (2023), yaitu bahwasanya dalam penelitian beliau membahas tentang penurunan perolehan kursi partai Golkar dalam pemilihan legislatif DPRD DKI Jakarta tahun 2019, disebabkan oleh pemimpin partai tersebut tersandung kasus penistaan agama. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Arizal Saputra, MA Ubaidullah, S. Mulaawit M IP (2021), membahas tentang analisis kegagalan marketing politik partai Nasdem pada pemilu legislatif tahun 2019 di Aceh, yang disebabkan adanya informasi yang tersebar bersifat

hoax atau kampanye hitam yang memprovokasi masyarakat aceh dengan begitu partai Nasdem di Aceh mengalami penurunan perolehan jumlah kursi. Sri Dewi Monalisa Siahaan (2022), membahas tentang penurunan suara partai Demokrat dalam pemilihan legislatif Provinsi Jambi tahun 2019, hal ini disebabkan karena terjadinya kasus korupsi yang melibatkan beberapa anggota partai Demokrat sehingga menyebabkan citra partai Demokrat menurun dalam pandangan masyarakat.

*Kedua* terdapat 5 artikel yang membahas tentang rendahnya elektabilitas sebuah partai yang menyebabkan penurunan perolehan jumlah kursi pada partai tersebut, yaitu penelitian yang dilakukan Hafijal (2020) membahas tentang analisis penurunan perolehan kursi partai Aceh di Kabupaten Aceh Barat dalam pemilu legislatif tahun 2019, hal ini terjadi karena adanya perpecahan elit sebab itu perubahan perilaku pemilih masyarakat dipicu juga rendahnya elektabilitas calon legislatif yang diusung. Kemudian penelitian yang dilakukan Muhammad Brilly, Cut Maya Aprita Sari (2019) membahas tentang kegagalan partai Golkar dalam memperoleh kursi legislatif di Kabupaten Pidie Jaya pada pemilu tahun 2014, terjadi kegagalan mendapatkan kursi pada partai karena kurang populernya calon legislatif yang diusung ditambah dengan minimnya dana kampanye calon legislatif tersebut. Trisna Winda, Effendi Hasan (2019) membahas tentang penurunan kepercayaan publik terhadap elit politik partai Aceh (studi kasus: kekalahan pasangan Erwanto-Muzakir pada pilkada serentak Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2017), terjadi penurunan perolehan kursi partai calon caleq kurang bersosialisasi kepada masyarakat dengan begitu kurang dikenal oleh masyarakat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Zulkarnaen Sitanggang (2012) membahas tentang dinamika partai politik Kota Medan tahun 2004-2009 (studi kasus: partai persatuan pembangunan (PPP), bahwasanya dalam temuannya terdapat terjadinya penurunan perolehan jumlah kursi pada partai PPP yang disebabkan lemahnya dukungan masyarakat karena kurang menarik program kegiatan yang diadakan oleh calon legislatif. Penelitian yang dilakukan Syafridho, Syawal Ayuza (2022) membahas tentang analisis penurunan suara partai Hanura pada pemilu legislatif Kota Padang tahun 2019 dalam perspektif pelembagaan partai politik. Hal ini terjadi karena adanya caleg baru di dunia politik yang menyebabkan tidak dikenal masyarakat.

*Ketiga* terdapat 2 artikel penelitian yang membahas tentang kegagalan dalam marketing politik yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah kursi pada partai politik, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Abdullah, Cut Maya Aprita Sari, S.Sos (2020) membahas tentang penurunan elektabilitas partai Aceh pada pemilihan legislatif DPRA pada tahun 2019, hal ini dikarenakan tidak lepas dari kinerja partai dalam marketing politik untuk memilih sosok figur dalam sebuah partai yang sangat berpengaruh dalam sebuah partai, dimana dalam hal ini tidak dilakukan oleh partai Aceh tidak ada sosok figur didalam partai nya, terjadilah penurunan jumlah kursi pada partai Aceh. Penelitian yang dilakukan Imogen T. Liu (2018) membahas tentang pentingnya pemimpin partai dan evaluasi partai dalam pemilu Selandia Baru. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya sosok figur atau pemimpin partai yang berkualitas

sangatlah berpengaruh besar dalam sebuah partai itu menang atau kalah.

Hasil riset menunjukkan dari penelitian diatas yang dilakukan oleh Fadhlani Satria Wiranda (2023), Arizal Saputra, MA Ubaidullah, S. Mulaawit M IP (2021), dan Sri Dewi Monalisa Siahaan (2022) bahwasanya penelitian mereka sejalan karena mengalami penurunan perolehan kursi yang disebabkan oleh hilangnya atau berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap partai politik tersebut. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Hafijal (2020), Muhammad Brilly, Cut Maya Aprita Sari (2019), Trisna Winda, Effendi Hasan (2019), Syafridho, Syawal Ayuza (2022) dan Zulkarnaen Sitanggang (2012). Bahwasanya penelitian tersebut sejalan yang dimana penemuan dari penelitian mereka mengalami penurunan perolehan kursi pada partai disebabkan oleh rendahnya elektabilitas calon legislatif. Kemudian penelitian yang dilakukan Abdullah, Cut Maya Aprita Sari, S. Sos (2020), dan Imogen T. Liu (2018). Bahwasanya penelitian tersebut sejalan yang dimana penurunan perolehan suara dan jumlah kursi disebabkan karena kekosongan sosok figur dalam sebuah partai.

Kurangnya persiapan saat menghadapi pemilu tercermin dari terjadinya, kehilangan rasa kepercayaan masyarakat, program-program kegiatan yang kurang menarik, kurangnya daya tarik figur atau kekosongan sosok figur dalam partai, rendahnya elektabilitas calon legislatif, dan minimnya dana kampanye calon. Sebenarnya, penurunan perolehan kursi bisa dihindari jika melakukan persiapan yang matang dengan cara membuat strategi kampanye yang efektif, mencari dan merekrut calon legislatif yang berkualitas untuk bertarung dalam pemilu, mengelolah dana

kampanye dengan baik, memberikan program-program yang inovasi, mempunyai figur yang kuat dalam memompang partai tersebut, dan dapat memahami kekuatan dan kelemahan bersaing serta strategi mereka untuk mengembangkan strategi bersaing. Makabegitu dapat menambah jumlah kursi atau dapat mempertahankan jumlah kursi yang sudah ada.

**Tabel 1.5**  
**Ringkasan Hasil Tinjauan Pustaka**

No.	Jenis Pengelompokan	Hasil Penelitian
1.	Menurunnya rasa kepercayaan publik terhadap elit politik	Fadhlan Satria Wiranda (2023), Arizal Saputra, MA Ubaidullah, S. Mulaawit M IP (2021), dan Sri Dewi Monalisa Siahaan (2022). Temuan hasil dari penelitian kelompok ini terjadinya penurunan jumlah kursi dalam penelitian, yaitu hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap partai tersebut yang menyebabkan penurunan perolehan jumlah kursi pada partai politik.
2.	Rendahnya elektabilitas calon legislatif.	Hafijal (2020), Muhammad Brilly, Cut Maya Aprita Sari (2019), Trisna Winda, Effendi Hasan (2019), Syafridho, Syawal Ayuza (2022) dan Zulkarnaen Sitanggang (2012). Dari hasil

		penelitian ini yang terjadi adalah kurangnya ketelitian partai dalam merekrut calon legislatif yang berkualitas dan kompeten untuk dijadikan kader partai politik, maka terjadilah penurunan perolehan jumlah kursi.
3.	Kegagalan dalam melakukan marketing politik saat pemilu.	Abdullah, Cut Maya Aprita Sari, S.Sos (2020), dan Imogen T. Liu (2018). Dari hasil penelitian tersebut terjadinya penurunan perolehan jumlah kursi atau suara disebabkan kurangnya memilih dalam melakukan marketing politik untuk memilih sosok figur yang dijadikan benteng dalam sebuah partai.

Sumber: diolah oleh penulis (2024).

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dikelompokan pada tabel diatas, masing-masing penelitian membahas tentang penurunan jumlah kursi pada partai akibat menurunnya rasa kepercayaan publik terhadap elit politik, rendahnya elektabilitas calon legislatif, kegagalan dalam melakukan marketing politik saat pemilu. Namun belum ada penelitian yang secara komprehensif membahas tentang analisis konsolidasi pelebagaan partai, oleh karena itu penelitian ini berjudul: **“Analisis Konsolidasi Pelebagaan Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Merangin Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, penelitian ini merumuskan masalah yang terjadi bahwa pada pemilihan legislatif di Kabupaten Merangin pada tahun 2024 salah satu partai terbesar yaitu partai Golkar yang ada di Kabupaten Merangin mengalami penurunan jumlah kursi. Pada pemilihan umum tahun 2019 mendapatkan jumlah kursi terbanyak yaitu 6 kursi dengan suara sebanyak 37.844 dan menduduki sebagai Ketua DPRD di Kabupaten Merangin, namun pada pemilihan umum tahun 2024 hanya mendapatkan 4 kursi dengan suara sebanyak 27.815. Sehingga Partai Golongan Karya tidak dapat mempertahankan jumlah kursi yang telah didapat maupun kedudukannya sebagai Ketua DPRD di Kabupaten Merangin, maka penelitian ini mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsolidasi pelembagaan pada Partai Golongan Karya (Golkar) dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Merangin tahun 2024?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini dengan berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ada diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan konsolidasi pelembagaan pada Partai Golongan Karya (Golkar) dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Merangin tahun 2024.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait didalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### a. Manfaat secara Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu politik, khususnya tentang analisis konsolidasi kelembagaan Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Merangin pada pemilihan legislatif tahun 2024 dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang politik. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya.

#### b. Manfaat secara Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjelaskan tentang analisis konsolidasi kelembagaan Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Merangin pada pemilihan legislatif 2024.

### 1.5. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan landasan teori untuk mempermudah memecahkan masalah yang dikaji dan untuk mendukung peneliti menyelesaikan penelitian tersebut, maka dari itu peneliti menggunakan beberapa teori.

#### 1. Partai Politik

##### a. Pengertian partai politik

Menurut pasal 1 ayat 1 UU RI No.2 Tahun 2008, menjelaskan bahwa arti dari partai politik yaitu sekelompok warga negara yang memiliki kepentingan bersama untuk membela kepentingan kehidupan warga negara. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar persamaan kehendak dan tujuan untuk memperjuangkan

kepentingan anggota mereka, masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan umum partai politik adalah untuk mengembangkan cita-cita nasional, menjaga, dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan mempertahankan kedaulatan rakyat, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (UUD RI, 2008).

Menurut Miriam Budiardjo (2008) partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional.

Menurut Carl J. Friedrich dalam Ramlan (2016) menjelaskan bahwa partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil yang mempunyai tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam suatu pemerintahan. Kemudian, lanjut Roger Henry Soltau dalam Ramlan (2016) juga memberikan pandangannya tentang pengertian dari partai politik. Menurutnya, partai politik adalah perkumpulan dari sedikit banyaknya manusia yang terorganisir dan mereka bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan memanfaatkan kekuasaannya untuk kebijakan umum yang mereka buat (Al-Bahra Bin Ladjamudin, 2017).

#### b. Fungsi partai politik

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya partai politik sebagai suatu sarana untuk manusia atau warga negara untuk membentuk suatu organisasi dalam

menyalurkan aspirasinya. Kemudian diwujudkan dengan fungsi partai politik itu sendiri. Dalam negara yang demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi (Meri Yarni,2011), yaitu:

- 1) Partai Sebagai Sarana Komunikasi Politik adalah salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.
- 2) Partai Sebagai Sarana Sosialisasi Politik. Dalam konsteks ini juga partai politik merupakan wadah bagi sosialisasi produk hukum dan kebijakan yang telah dibuat oleh pemegang kekuasaan (legislatif maupun eksekutif). Partai politik merupakan pihak yang berpran untuk melakukan pemberitahuan / sosialisasi produk hukum atau kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat terutama masa pemilihnya.
- 3) Partai Politik Sebagai Sarana Recruitment Politik. Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*Political Recruitment*). Dalam konteks ini partai politik tidak bersifat instan dalam mencalonkan seseorang untk mendapatkan kekuasaan (legislatif atau eksekutif) tetapi dalam 5 tahun (per priode pemilihan umum) partai politik mempunyai program memproduksi warga negara yang akan dicalonkan ke legislatif ataupun eksekutif.
- 4) Partai Politik Sebagai Sarana Pengatur Konflik (*Conflict Management*) dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat

merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya.

## 2. Pelembagaan Partai Politik

Pelembagaan politik menurut Randall dan Svasand yaitu pelembagaan partai dinilai sebagai sebuah proses dalam penyempurnaan partai politik berdasarkan aspek-aspek struktural dan kultural yang diaplikasikan dalam etika dan budaya (Svasand and Randall 2002). Menurut Samuel P. Huntington (1973) mengemukakan pendapatnya mengenai pelembagaan partai bahwa pelembagaan merupakan suatu langkah dalam suatu prosedur dan pengorganisasian mengandung nilai dan stabilitas. Huntington menjelaskan lebih rinci bahwasanya dalam pelembagaan partai politik terdapat empat aspek utama, yaitu penyesuaian diri-kekuatan, kompleksitas-kesederhanaan, otonomi-subordonasi, dan koherensi-perpecahan (Adityasandi, 2023).

Menurut Basedau dan Stroh menjelaskan bahwa pelembagaan partai merupakan suatu proses yang dialami oleh suatu partai politik yang mengikuti kontestasi pemilihan umum dan mengalami peningkatan stabilitas serta nilai-nilai organisasi. Peningkatan nilai-nilai diartikan oleh sebagian orang yang relevan dalam hal ini anggota partai dan pemilih yang meyakini bahwa partai politik dalam demokrasi tidak bisa dilupakan (Syafriidho, 2022).

Dalam masyarakat, partai politik memiliki akar yang kuat dan stabil, otonomi mengarah terhadap sejauh mana partai politik dapat menerapkan prinsip independen dari individu baik dari batang tubuh partai politik itu sendiri maupun dari luar partai politik. Dimensi organisasi mengarah terhadap sejauh mana kader partai hadir secara

berkelanjutan dalam semua level administrasi dan bertindak sesuai ideologi partai, serta turut aktif dalam kegiatan-kegiatan partai politik baik dalam masa pemilu seperti kampanye maupun kegiatan diluar pemilu. Sedangkan koherensi mengarah pada partai politik sebagai suatu kesatuan organisasi yang selalu menjaga keharmonisan dan perdamaian serta memiliki toleransi yang tinggi atas perselisihan dalam partai politik (Sigit, 2011).

Menurut Basedau dan Stroh membagi klasifikasi pelebagaan partai kedalam empat dimensi indeks pelebagaan (Basedau dan Stroh, 2004), yaitu sebagai berikut:

a. Mengakar Dalam Masyarakat (*roots in society*)

Partai politik yang dikelola dan dikembangkan dengan baik, harus memiliki kestabilan yang mengakar di masyarakat. Dengan kata lain, partai politik harus menarik simpati dan memiliki ruang khusus di hati masyarakat itu sendiri. Mendapatkan ruang khusus di hati masyarakat bukanlah persoalan yang mudah, perlu waktu yang lama dan tidak didapatkan secara instan. Partai politik harus memberikan bukti bahwa partai tersebut sudah melaksanakan fungsi-fungsi partai politik dalam menyikapi persoalan yang terjadi di masyarakat dan menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat. Apabila fungsi-fungsi partai politik telah dilaksanakan dengan baik maka akan mendapatkan respon positif dari masyarakat.

b. Independen dalam mengambil keputusan (*autonomy*)

Partai politik memiliki tantangan untuk menyeimbangkan antara pelebagaan yang mengakar dalam masyarakat dengan otonomi organisasi. Otonomi ialah partai politik wajib mempunyai peranan yang vital dalam setiap kebijakan yang dibuat

pemerintahan serta sikap untuk keberlangsungan organisasi. Partai politik yang solid dalam pelembagaan tidak akan mudah dipengaruhi atau terintervensi dari pihak-pihak lain dalam menentukan sikap dan kebijakan. Intervensi dari pihak-pihak individu yang kuat dan berada di dalam partai hampir tidak dapat dihindari, namun partai politik dapat meminimalisir hal-hal yang demikian.

Otonomi yang baik dan tegas dapat meminimalisir intervensi dari orang-orang yang memiliki pengaruh untuk menjadikan partai politik hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan individu dan kelompok-kelompok tertentu.

b. Kekuatan Organisasi (*level of organization*)

Ditingkat internal, partai politik harus memiliki kekuatan organisasi untuk mengukur seberapa besar terlembaganya suatu partai politik. Kekuatan organisasi digunakan partai untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan untuk menambahkan spirit perjuangan bagi setiap individu kader partai di dalam tubuh internal partai politik tersebut. Militansi yang dimiliki setiap insan kader partai politik dalam menjalankan fungsi partai politik sesuai ideologi, visi, dan misi yang dimiliki partai politiknya secara baik dapat dijadikan sebagai tolak ukur kekuatan organisasi. Selain itu, untuk mengukur kekuatan organisasi yang dimiliki suatu partai politik dapat dilihat dari seberapa tepat sasaran partai politik melaksanakan kongres partai sesuai yang tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dimiliki oleh masing-masing partai politik. Kekuatan organisasi partai politik juga dipengaruhi oleh kader-kader dan anggota anggota yang dimiliki oleh partai tersebut, apabila di dalamnya terdapat kader yang berkualitas, maka dapat meningkatkan kekuatan

organisasi yang dimiliki oleh partai tersebut.

c. Kekompakan para anggota partai (*coherence*)

Pada dasarnya, partai politik harus bergerak dan melakukan tindakan sebagai satu kesatuan organisasi, bukan perorangan atau kelompok di dalam partai politik tersebut. Koherensi dapat diterjemahkan bagaimana suatu partai politik mampu mentoleransi serta menengahi perselisihan yang terjadi dalam internal partai. Oleh karena itu, koherensi memiliki tujuan utama untuk menyamaratakan visi misi dan arah tujuan partai.

1.5.1. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual adalah menjelaskan secara abstrak tentang suatu konsep yang ada di dalam landasan teori dengan cara singkat dan jelas. Maka dari itu definisi konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.
2. Perlembagaan politik proses dimana organisasi dan tata cara memperoleh nilai baku dan stabil yang mewujudkan dalam pemantapan harapan sikap politiknya kepada partai politik tersebut. Kehadiran partai seharusnya membawa dampak baik kepada masyarakat bukan hanya sekelompok elit yang sama sekali tidak terhubung dengan rakyat.

### 1.5.2 Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah bagian yang paling mendasar yang terdapat di dalam sebuah proses penelitian, karena dalam bagian ini akan menjelaskan petunjuk untuk mengukur suatu variabel dalam melakukan penelitian. Bagian ini akan ditentukan indikator variabel dan bagaimana mengukur indikator tersebut. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan empat unsur kelembagaan yang berkaitan dengan penurunan pada partai politik (Basedau dan Stroh, 2004). Alasannya karena penelitian ini ingin menjelaskan tentang konsolidasi pelembagaan partai Golkar Kabupaten Merangin pada pemilihan legislatif tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Mengakar dalam masyarakat
  - a. Struktur partai politik yang dikelola dan dikembangkan dengan baik, harus memiliki kestabilan yang mengakar di masyarakat agar menarik simpati dan memiliki ruang khusus di hati masyarakat itu sendiri.
  - b. Kepercayaan masyarakat, berkaitan dengan menjaga nama baik partai agar dapat selalu di percaya masyarakat.
2. Independen dalam mengambil keputusan
  - a. Otonomi yaitu mengambil sikap yang tidak bisa di intervensi oleh banyak orang.
3. Kekuatan organisasi
  - a. Organisasi, berkaitan mengarah terhadap sejauh mana kader partai turut aktif dalam kegiatan-kegiatan partai politik baik dalam masa pemilu seperti kampanye maupun kegiatan diluar pemilu.

- b. Kader partai politik dalam menjalankan fungsi partai politik sesuai ideologi, visi, dan misi yang dimiliki partai politiknya secara baik dapat dijadikan sebagai tolak ukur kekuatan organisasi. Maka kader partai politik harus yang berkualitas.
4. Kekompakan para anggota partai
- a. Partai politik harus bergerak dan melakukan tindakan sebagai satu kesatuan, berkaitan agar mampu mentoleransi serta menengahi perselisihan yang terjadi dalam internal partai.
  - b. Stabilitas dan keharmonisan untuk menambahkan spirit perjuangan bagi setiap individu kader partai di dalam tubuh internal partai politik.

## 1.6. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan terkait analisis penurunan jumlah kursi partai Golkar dalam pemilihan legislatif agar hasil dari penelitian ini lebih detail dan akurat. Dengan menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang khas meneliti tentang permasalahan social dan kemanusiaan. Peneliti menggambarkan satu kesatuan yang kompleks, menganalisis kata-kata, melakukan report dengan detail dari para informan dan melaksanakan studi tersebut dalam lingkungan yang alam (Creswell W. Jhon, 2015).

Studi kasus adalah merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang dimana peneliti melakukan ekspolasi secara mendalam terhadap program atau kejadian, dalam suatu kasus yang terkait oleh waktu dan aktifitas. Peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan (Sugiono, 2019).

### 1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan lokasi yang dimana peneliti melakukan penelitiannya. Penentuan lokasi yang tepat sangat diperlukan guna mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Merangin, hal ini dikarenakan lokasi tersebut adalah daerah yang dimana partai Golkar tersebut mengalami penurunan jumlah kursi pada pemilihan legislatif tahun 2024.

### 1.7.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari (Sugiono, 2019).

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data penelitian yang didapatkan melalui narasumber atau informan melalui wawancara secara langsung antara narasumber dan pengumpul data. Dalam penelitian ini peneliti berencana melakukan wawancara kepada informan secara langsung ataupun melakukan pengamatan secara langsung atas situasi dan kondisi untuk mendapatkan data yang valid dilapangan, agar kemudian dapat dideskripsikan melalui hasil penelitian yang komprehensif.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan suatu bahan pendukung untuk memudahkan penelitian. Data sekunder dapat bersumber dari buku-buku, jurnal/skripsi dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan. Pada penelitian data sekunder yang digunakan yaitu teori dari buku, jurnal/skripsi, media sosial yang terpercaya, dan data perolehan yang bersumber dari KPU Merangin.

### 1.7.4. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini teknik penentuan informan menggunakan Teknik purposing sampling snowball sampling atau sang peneliti memulai dengan beberapa informan kunci, kemudian meminta informan tersebut untuk mengidentifikasi (Sugiono, 2019). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka informan yang akan di pilih dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang tentunya memahami terkait konsolidasi pelembagaan partai Golkar Kabupaten Merangin pemilihan legislatif tahun 2024.

### 1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan 2 tahap, yaitu:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan bertanya, mendengar dan melihat secara mendalam namun tidak terstruktur. Dalam proses wawancara peneliti berusaha mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari berbagai pihak yang terdiri dari beberapa elemen yang berkaitan dengan objek penelitian. Secara singkat bisa dikatakan wawancara merupakan sebuah proses interaksi antara pewawancara (*Interviewers*) dengan informan atau orang yang diwawancarai (*Interviewed*) dengan melakukan komunikasi langsung. Dimana pada penelitian ini pewawancara langsung melakukan percakapan tatap muka (*face to face*) untuk menanyakan tentang obyek penelitian yang berkaitan dengan Analisis Penurunan Jumlah Kursi Partai Golongan Karya (Golkar) Dalam Pemilihan Legislatif Di Kabupaten Merangin Pada Tahun 2024.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka narasumber yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang tentunya memahami terkait penurunan jumlah kursi pada partai Golkar dalam pemilihan legislatif tahun 2024. Berikut adalah narasumber dalam penelitian ini:

**Tabel 1.6**  
**Narasumber Wawancara**

No.	Nama Narasumber	Jabatan
1.	Herman Efendi, S.T., M.M.	Ketua DPC partai Golkar Kabupaten Merangin.
2.	Samdianto, S.Sos.	Anggota Legislatif yang terpilih di partai Golkar.
3.	H. Sukar	Bapilu partai Golkar Kabupaten Merangin.
4.	Dr. H. Pahrudin HM, S.S., M.A.	Akademisi politik.

**b. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada objek penelitian, yang dimana peneliti menganalisis dan mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan selama proses penelitian guna mendapatkan data yang akurat dengan metode pengambilan dokumentasi berupa bukti seperti file dokumen, foto gambar, artikel jurnal, berita online dan data-data tertulis yang mendukung keabsahan data.

**1.7.6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi.

**a. Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data perlunya dilakukan pemilihan data yang relevan agar dapat menjadi jawaban dari pertanyaan dalam penelitian, karna data yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi adalah data mentah yang didapatkan dari lapangan. Kemudian setelah data-data tersebut selesai dipilih, selanjutnya data tersebut

disederhanakan dengan mengambil data pokok yang dapat digunakan sebagai jawaban dari pertanyaan dalam penelitian.

#### b. Penyajian Data

Langkah berikutnya adalah menyajikan data. Dalam suatu penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan yang menjadi salah satu jenis penyajian yang paling sering dipakai dalam penelitian kualitatif yaitu teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, tentu saja akan memudahkan peneliti dalam memahami peristiwa yang terjadi, yang kemudian merencanakan kerja selanjutnya yang dilandasi dari apa yang telah dipahami.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Langkah yang terakhir dalam melakukan analisis data kualitatif adalah melakukan penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan awal yang dipahami masih bersifat sementara dan akan bisa berubah tetapi jika tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang bisa mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya. Namun jika kesimpulan yang dikemukakan diawal, didukung oleh bukti yang valid serta konsisten saat peneliti kembali melakukan pengumpulan data maka kesimpulan yang diambil, merupakan kesimpulan yang kredibel.

#### 1.7.7. Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data penelitian yang dilakukan dalam rencana penelitian ini menggunakan tahapan pengecekan kredibilitas data menggunakan teknik triangulation yakni melakukan pengecekan kembali derajat kepercayaan suatu

informasi yang didapatkan menggunakan triangulasi sumber, metode dan teori (Mekarisce.A, 2020). Pengujian kebenaran suatu informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai kondisi berupa pengujian kebenaran serta akurasi data harus dengan berbagai macam cara.

Triangulasi merupakan suatu pendekatan yang menggunakan beragam sumber, metode, peneliti dan teori agar dapat menyediakan bukti pendukung yang dipergunakan untuk validasi. Biasanya dalam proses ini diperlukan bukti kuat yang berasal dari sumber yang beragam. Triangulasi dengan sumber data perlunya dilakukan pengecekan data berupa proses wawancara berulang-ulang dengan mengajukan pertanyaan tentang hal yang sama dalam waktu yang berbeda.